

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI



Oleh
MUH JALIL
105730538015

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Analisis Sistem Dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan"

Nama Mahasiswa : **Muh. Jalil**

NIM : 105730538015

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 04 Februari 2023 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 Februari 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Mira, SE., M. AK., AK.
NIDN: 0903038803

Pembimbing II

Masrullah, SE., M. Ak
NIDN: 09230889201

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Mira, SE., M. Ak. Ak
NBM: 1286 844



Dr. H. Anwar Jam'an, SE., M. Si
NBM: 651 507



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : **Muh Jalil, Nim : 105730538015** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor. 003/SK-Y/62201/091004/2023 M, Tanggal 13 Rajab 1444 H / 04 Februari 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Rajab 1444 H

04 Februari 2023 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Mira, SE., M.Ak.Ak
2. Amran, SE., M., AK., AK., CA
3. Syamsuddin, PD., M., AK
4. Masrullah, SE., M.AK

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dianjukan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651 507



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Jalil

Stambuk : 105730538015

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan pada badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 04 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan,

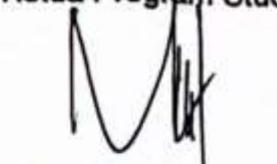

Muh. Jalil

NIM: 105730538015

Diketahui Oleh:


Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi


Mira, SE., M.Ak.Ak
NBM: 1286 844

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Jalil
NIM : 105730538015
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

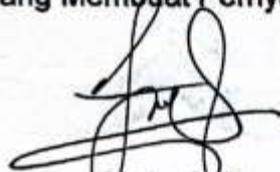
Analisis sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan pada badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 04 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan,


Muh. Jalil
NIM: 105730538015

KATA PENGANTAR



“Assalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh”

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena telah melimpahkan rahmatnya berupa kesehatan, kesempatan dan pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis Bapak Abd. Rahman Moha dan Mariati atas segala pengorbanan, dukungan, kasih sayang dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menggelar dan mendidik sejak kecil hingga sekarang ini. Semoga yang telah mereka berikan kepada saya menjadi kebaikan dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga khususnya kepada dosen pembimbing saya, Ibunda Mira, SE., M.Ak.Ak selaku pembimbing I dan ayahanda

Masrullah, SE., M.Ak selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bantuan dan arahan serta bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa penulis menghanturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Ambo Asse, M,Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE.,M.Ak selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Dosen-dosen, Staf Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan saya banyak sekali ilmu, pengalaman, pembelajaran yang akan menjadi bekal saya di kemudian harinya.

Semoga segala bantuan dan bimbingannya mendapatkan balasan yang setimpalnya dari Allah Swt sebagai amal ibadah, Aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak penulis sangat mengharapkan demi perbaikan-perbaikan kedepannya.

Wassalamualikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Makassar, 27 Januari 2023

Penulis,

Muh. Jalil

ABSTRAK

MUH. JALIL, 2023. Analisis Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Ibu Mira, SE., M.Ak.Ak dan Bapak Masrullah, SE., M.Ak.

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengidentifikasi Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan, mengidentifikasi kendala dan keunggulan pada sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan. Data ini diambil dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari data/arsip laporan BAPENDA Sulsel. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer.

Berdasarkan hasil penelitian data dari BAPENDA Sulsel yang merujuk pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun laporan yang terdiri atas: 1) Laporan Realisasi Anggaran; 2) Neraca; 3) Laporan Operasional; 4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan 5) Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan Kendala yaitu: a) Kendala jaringan. b) Ketidakstabilan kinerja Bendahara disetiap UPT Kabupaten karena sering terjadi keterlambatan dalam penyeteroran SPJ. Dan Keunggulan semua laporan mulai dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan catatan atas laporan keuangan sudah dalam satu sistem yang mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan.

Kata Kunci: Sistem, Prosedur, Laporan Keuangan

ABSTRACT

MUH. JALIL, 2023. Analysis of Systems and Procedures for Preparing Financial Statements at the Regional Revenue Agency of South Sulawesi Province. Thesis of the Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Mrs. Mira, SE., M.Ak.Ak dan Mr. Masrullah, SE., M.Ak.

The purpose of this research is to identify the System and Procedure for Preparing Financial Statements at BAPENDA of South Sulawesi Province, to identify the constraints and advantages of the system and Procedure for Preparing Financial Statements at BAPENDA of South Sulawesi Province. This data is taken from the Regional Revenue Agency of South Sulawesi Province. The type of data used in this study is qualitative data obtained from data/archives of the South Sulawesi BAPENDA report. In this study, the data sources used in data collection include primary data.

Based on the results of data research from BAPENDA Sulsel which refers to the Governor of South Sulawesi Regulation Number 73 of 2014 concerning the accounting policies of the Prov. Government. South Sulawesi and South Sulawesi Governor Regulation Number 74 of 2014 concerning the Regional Government Accounting System that the Head of the Regional Work Unit (SKPD) must prepare a report consisting of: 1) Budget Realization Report; 2) Balance Sheet; 3) Operational Report; 4) Statement of Changes in Equity; and 5) Notes to Financial Statements. With Constraints namely: a) Network constraints. b) Instability of the treasurer's performance in each Regency UPT due to frequent delays in the payment of SPJ. And the advantages of all reports starting from the Budget Realization Report, Operational Reports, Changes in Equity Reports, Balance Sheets, and notes on financial reports are already in one system that makes it easier to prepare financial reports.

Keywords: Systems, Procedures, Financial Reports

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Sistem dan Prosedur Akuntans.....	6
B. Penyusunan Laporan Keuangan.....	9
C. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.....	13
D. Siklus Akuntansi Keuangan Daerah.....	20
E. Penyajian Laporan Keuangan.....	24
BAB III. METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan Penelitian.....	29
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	29
C. Metode Pengumpulan Data.....	29
D. Metode Analisis.....	30
F. Definisi Operasional.....	31

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Profil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....	33
B. Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan	40
C. Kendala pada Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan.....	56
D. Keunggulan pada Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan.....	56
BAB V. PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini menuntut berbagai kalangan untuk melakukan perubahan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi. Bagi kalangan pengusaha, lembaga formal dan non formal, informasi keuangan sangat diperlukan untuk pengambilan suatu keputusan ekonomi secara cepat, tepat dan akurat. Akuntansi merupakan suatu alat bisnis yang digunakan oleh perusahaan dalam menyampaikan hasil informasi keuangan pada periode tertentu. Transaksi-transaksi keuangan diproses sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang siap digunakan.

Akuntansi adalah suatu proses yang terdiri dari pencatatan, penggolongan, peringkasan dari bukti transaksi, dan pelaporan atas transaksi-transaksi keuangan pada suatu perusahaan (Sutrisno, 2018: 1).

Pemakaian komputer dalam bidang akuntansi memberikan manfaat yang besar, baik dalam ketelitian maupun pekerjaan yang dapat ditangani. Perusahaan dapat menentukan keuntungan yang akan diperoleh dan kerugian yang bisa dideteksi dari waktu ke waktu. Sehingga jika perusahaan memperoleh keuntungan, maka dapat digunakan untuk memajukan usahannya dan apabila mengalami kerugian, maka perusahaan dapat mencari solusi dari penyebabnya dan menentukan cara yang tepat untuk menanggulunginya.

Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terikat dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar (Marshall B. Romney, Paul Jhon Steinbart, 2020: 3).

Sistem akuntansi sangat erat hubungannya dengan organisasi sektor publik atau perusahaan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Pada transaksi keuangan, pencatatannya sudah menggunakan komputerisasi dan merupakan cara tertentu dimana organisasi atau perusahaan melaporkan tentang informasi keuangan secara tepat waktu.

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan suatu entitas bisnis. Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan seperti: Instansi pemerintah, manajer, investor, dan kreditor dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi (Dwi Prastowo Darminto, 2019: 3).

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan instansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang Berkedudukan sebagai pelaksana pada bidang pengelolaan pendapatan daerah, yang menyangkut tentang penerimaan, belanja, pembiayaan dan aset daerah. Sebagai pelaku akuntansi pada entitas pelaporan dan entitas

akuntansi, BAPENDA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tingkat daerah.

Laporan keuangan pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi tersebut tergabung menjadi satu dan menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selanjutnya LKPD yang telah disusun oleh BAPENDA tersebut akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor pemerintah untuk dilakukan audit.

Pemerintah sebagai organisasi sektor publik yang mengelola dana dari masyarakat dituntut untuk dapat memberika informasi publik melalui sebuah laporan keuangan. Alur perputaran dana yang dibayarkan oleh masyarakat melalui pumungutan wajib pajak yang masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus dipertanggung jawabkan kegunaannya. Masyarakat berhak tahu dan mengerti bagaimana dan untuk apa dana pajak yang selama ini telah mereka bayarkan. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah akan bertambah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil judul: "SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) PROVINSI SULAWESI SELATAN".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, dapat diidentifikasi permasalahan yang ada yaitu:

1. Mengetahui Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Mengetahui kendala pada Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Mengetahui keunggulan pada Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mampu mengidentifikasi Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Mampu mengidentifikasi kendala pada sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Mampu mengidentifikasi keunggulan pada sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mendalam khususnya mengenai sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.

2. Bagi Instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau saran dalam mengevaluasi sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.
3. Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini dapat menambah dan memberi pengetahuan dan menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem dan Prosedur Akuntansi

1. Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu kerangka yang memuat beberapa bagian dan disebut dengan subsistem, saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Zaki Baridwan, 2019: 4).

Sistem adalah sekelompok unsur yang erat dan saling terhubung antara satu dengan lainnya. Berfungsi secara bersamaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Mulyadi, 2019: 2).

Sistem terdiri dari beberapa subsitem yang telah disusun menjadi sebuah komponen yang erat dan terhubung, saling berinteraksi agar dapat mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

2. Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan dari kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang di dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2019: 5).

Terdapat beberapa tahapan dari kegiatan klerikal tersebut menurut Mulyadi, (2019: 5-6) diantaranya adalah:

- a. Menulis;
- b. Menggandakan;
- c. Memberi kode

- d. Mendaftar;
- e. Memilih;
- f. Memindah;
- g. Membandingkan.

Menurut W. Gerald Cole (dalam Zaky Baridwan, 2019: 3), Prosedur merupakan suatu urutan dari pekerjaan, dikarenakan biasanya prosedur melibatkan beberapa orang dalam suatu kegiatan atau lebih dan disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap transaksi yang sering terjadi.

Prosedur merupakan tata cara atau urutan dalam melakukan suatu kegiatan yang sering terjadi pada suatu departemen secara berulang-ulang. Prosedur terdiri dari kegiatan klerikal, yang melibatkan beberapa orang atau lebih, agar memudahkan terlaksananya penanganan secara seragam pada tiap-tiap departemen.

3. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi terdiri atas formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, serta alat-alat yang digunakan untuk mempermudah dalam pengolahan data suatu perusahaan. Howard F. Stettler (dalam Zaki Baridwan, 2019: 4).

Tujuan dari sistem akuntansi adalah untuk menghasilkan informasi keuangan dari suatu perusahaan. Informasi keuangan tersebut berguna bagi manajemen, dan berbagai pihak eksternal sebagai bahan penilaian untuk pengambilan suatu keputusan.

Menurut Mulyadi (2019:3-4), terdapat pokok-pokok dari sistem akuntansi, yaitu: formulir-formulir, catatan-catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan.

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam suatu transaksi ke dalam catatan. Sedangkan dalam sistem akuntansi secara manual, media yang digunakan untuk merekam data transaksi keuangan adalah formulir yang dibuat dari secarik kertas, akan tetapi dalam sistem akuntansi secara komputerisasi media yang dipergunakan untuk merekam data transaksi keuangan adalah sistem pengolahan data.

Menurut Al. Haryono Jusup (2017: 481), terdapat tiga tahapan dalam perancangan sistem akuntansi. Pertama, mengenal dokumen bukti transaksi dan data penting lain yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Kedua, mengelompokkan dan mencatat data yang tercantum dalam dokumen bukti transaksi ke dalam catatan-catatan akuntansi, baik secara manual ataupun komputerisasi. Ketiga, mengumpulkan dokumen bukti transaksi yang tercantum pada catatan-catatan akuntansi menjadi sebuah laporan keuangan yang berguna bagi manajer maupun pihak eksternal dalam pengambilan suatu keputusan.

Sistem akuntansi yang efektif dan efisien menurut Al. Haryono Jusup (2017:482), meliputi prinsip-prinsip dasar tertentu, yaitu:

- a. Hemat dalam segi beban perancangan dan pengoperasian;
- b. Menghasilkan output yang bermanfaat; dan

- c. Fleksibel dalam menghadapi kemungkinan perkembangan di masa yang akan datang.

Sistem akuntansi adalah suatu kerangka yang tersusun dari berbagai dokumen. Dokumen tersebut terdiri dari formulir-formulir dan catatan-catatan transaksi keuangan berupa jurnal, buku besar, buku pembantu dan laporan keuangan. Suatu sistem akuntansi yang efektif dan efisien harus mempunyai prinsip-prinsip dasar yang meliputi: hemat, bermanfaat, dan fleksibel. Terdapat tiga tahapan dalam menyusun perancangan sistem akuntansi, yaitu: pengenalan dokumen bukti transaksi, pengelompokan dan pencatatan dokumen transaksi tersebut ke dalam catatan-catatan akuntansi, serta menyusunnya menjadi sebuah laporan keuangan yang berguna bagi manajemen dalam mengawasi usahanya dan bagi pihak eksternal dalam pengambilan suatu keputusan.

B. Penyusunan Laporan Keuangan

1. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I.02 PSAP 01-6) adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi dengan cara:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi , kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisisumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2. Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteistik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Bastian (2016), terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:

- a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu

atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu agar informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki unsur berikut:

1) Manfaat umpan balik (*feedback value*).

Informasi ini memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.

2) Manfaat Prediktif (*prediktive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3) Tepat waktu (*timeliness*)

Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap

Informasi akuntansi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, akan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memiliki unsur berikut:

1) Dapat diuji kebenarannya (variable)

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

2) Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Penyajian secara wajar

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya

atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

C. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

1. Pengertian Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan organisasi sektor publik publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk manajemen sektor publik untuk memberikan informasi

kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2018). Menurut Sri Rahayu (2017) penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Dalam peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.

Dari pengertian yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sehingga pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang secara wajar dan diungkap secara lengkap agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terciptalah transparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan sesuai harapan.

2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Siti dan Aida 2012). Sedangkan menurut Halim (2009:20) menyatakan tujuan pelaporan keuangan daerah adalah menyajikan laporan tentang;

a. Posisi keuangan

Posisi keuangan atau neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu (contohnya akhir bulan, akhir semester, atau akhir tahun). Neraca, disebut juga laporan posisi keuangan, merupakan sumber informasi utama tentang posisi keuangan perusahaan karena neraca merangkum elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas.

b. Realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisari, sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.

c. Arus kas

Arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, inventasi asset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu.

d. Kinerja pelaporan keuangan

Kinerja pelaporan keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit.

Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnya UU No. 17 tahun 2003, pada Pasal 31 dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disajikan oleh kepala daerah setidaknya meliputi:

1) Laporan Realisasi APBD

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan

anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari :

a) Aset

Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat memperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya

b) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah.

c) Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, inventasi asset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut (Riyanti 2017):

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara/ daerah
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara daerah.

f. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan didalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah informasi posisi keuangan yang dihasilkan dari

kinerja dan aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya

3. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dan informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Menurut Diamond, (2002) Informasi keuangan didalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan pejabat pemda) ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan hutang yang mereka kelola.
- b. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.
- c. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban d) Memberikan informasi

yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

Menurut Fahmi (2015:5) yang menyatakan bahwa “Dengan adanya laporan keuangan yang disediakan manajemen perusahaan maka sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan dan sangat berguna dalam melihat kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan datang”.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari adanya laporan keuangan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam proses pengambilan keputusan demi kemajuan perusahaan atau instansi dimasa yang akan datang.

D. Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

1. Siklus akuntansi

Menurut Mahsun, Muhammad dkk (2017: 97-132), siklus akuntansi adalah sistematika prosedur pencatatan, peringkasan atas transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan.

Tahap awal dari siklus ini adalah pengidentifikasian atas transaksi keuangan, didukung oleh dokumen bukti transaksi dan dicatat pada buku jurnal. Catatan yang diperoleh dari buku jurnal akan diposting ke dalam buku besar yang berguna untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Semua akun akan

diklasifikasikan berdasarkan daftar saldo, kertas kerja dan penyesuaian.

2. Transaksi

Transaksi adalah kegiatan yang mengubah posisi keuangan pada suatu entitas. Suatu entitas memerlukan data transaksi dan bukti pendukung untuk proses pencatatan akuntansi dalam kegiatan operasinya.

a. Jenis Transaksi

Menurut jenisnya, transaksi terdiri dari:

- 1) Transaksi kas, yaitu transaksi yang menimbulkan bertambahnya atau berkurangnya kas. Sebagai contoh adalah penerimaan piutang, pembiayaan SP2D;
- 2) Transaksi nonkas, yaitu transaksi yang timbul akibat terjadinya perubahan pada aset, utang, dan pendapatan yang tidak berpengaruh terhadap kas. Sebagai contoh adalah penerimaan aktiva tetap dari donator dan pembebasan utang.

b. Bukti Transaksi

Bukti transaksi merupakan alat yang digunakan untuk pendokumentasian dari seluruh transaksi keuangan atau kejadian ekonomi. Sebagai contoh dari bukti transaksi adalah:

- 1) Kas: Surat Perintah Membayar (SPM);
- 2) Piutang: Daftar Piutang;
- 3) Persediaan: Daftar persediaan;

- 4) Aktiva Tetap: Daftar aktiva tetap;
- 5) Utang: Dokumen penarikan pinjaman;
- 6) Pendapatan: Surat Tanda Setoran (STS);
- 7) Belanja: Daftar Pembukuan Administratif (DPA)

c. Bukti Jurnal

Bukti jurnal merupakan alat pendokumentasian atas bukti transaksi ke dalam media pencatatan akuntansi. Bukti jurnal memuat kode debit pada sisi kanan dan kredit pada sisi kiri untuk perkiraan pencatatan dalam buku besar pada masing-masing transaksi.

d. Jurnal

Jurnal adalah alat atau metode yang dipergunakan dalam mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan maupun data lainnya.

e. Buku Besar

Buku besar adalah suatu buku yang memuat tentang kumpulan rekening dari dokumen bukti transaksi yang telah dicatat dalam jurnal.

f. Buku Besar Pembantu

Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat rincian tertentu yang ada di buku besar. Rekening-rekening buku besar yang biasanya membutuhkan buku besar pembantu adalah kas, piutang, persediaan, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan utang.

g. Saldo Buku Besar

Saldo buku besar merupakan kumpulan dari daftar rekening beserta saldo yang menyertai dalam suatu periode pelaporan.

h. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi digunakan untuk menghasilkan penyesuaian yang sesuai antara pendapatan dan belanja/pembiayaan. Jenis-jenis penyesuaian ini mempunyai sub- subkategori sebagai berikut:

- 1) Biaya Dibayar Dimuka, yaitu biaya dibayar tunai dan dicatat sebagai aktiva sebelum biaya tersebut dipakai;
- 2) Pendapatan Ditangguhkan, yaitu pendapatan yang sudah diterima secara tunai dan dicatat sebagai utang/kewajiban sebelum pendapatan tersebut diperoleh;
- 3) Pendapatan Terhimpun, yaitu pendapatan sudah diperoleh, namun belum dibayar secara tunai atau dicatat;
- 4) Biaya Terhimpun, yaitu biaya sudah dikeluarkan, namun belum dibayar secara tunai atau dicatat.

i. Laporan Keuangan

Hasil akhir dari proses akuntansi, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi agar berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan mengungkapkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan,

kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, dan realisasi pembiayaan.

j. Jurnal Penutup

Jurnal Penutup adalah penjournal yang dilakukan setelah laporan keuangan telah selesai disusun. Jurnal penutup dilakukan pada akhir periode akuntansi. Proses penutupan ini berfungsi untuk membuat saldo dari akun-akun pendapatan dan belanja /pembiayaan menjadi nol.

E. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan ini terdiri dari pengertian komponen- komponen laporan keuangan, yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

1. Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 (Lampiran-1), terdapat beberapa komponen dalam satu set laporan keuangan dan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial yang meliputi:

2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap

APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

a. Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas akuntansi yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Akuntansi Belanja LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Klasifikasi belanja dalam SAP adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja barang, belanja pegawai, subsidi, bunga, hibah, serta bantuan sosial;
- 2) Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap berwujud dan atau aset tidak berwujud yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi;

3) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi perbandingan antara kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih pada periode pelaporan saat ini dengan periode pelaporan sebelumnya secara komperatif

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih dari aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Setiap pemerintah daerah mengklasifikasikan aset lancar dan nonlancar serta

mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam neraca.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Operasional

Laporan operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

7. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

8. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan tentang rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan. Catatan Atas Laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lainnya yang harus dianjurkan untuk diungkapkan dalam SAP serta

ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan pendekatan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk penjelasan secara jelas dan terperinci. Temuan kualitatif diarahkan untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan mutu kerja dan pada dasarnya pula bermanfaat untuk kepentingan akademis

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P Pettarani No.1

2. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk penelitian ini adalah kurang lebih 2 bulan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2023.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur (*measurable*) atau

dihitung secara langsung dengan pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan telaah dokumen:

- a) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang ditujukan langsung kepada objek.
- b) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti terlibat langsung untuk mengamati.
- c) Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku maupun jurnal yang berkaitan dengan topik pembahasan.

D. Metode Analisis

Analisis data data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari objek penelitian melalui hasil observasi, wawancara,

studi literatur dan dokumentasi dilapangan untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperluka. Definisi operasional digunakan sebagai petunjuk tentang bagaimana suatu indikator diukur.

1. *Sistem* merupakan suatu kerangka yang memuat beberapa bagian dan disebut dengan subsistem, saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
2. *Prosedur* adalah suatu urutan dari kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang di dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang- ulang
3. *Sistem akuntansi* terdiri atas formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, serta alat-alat yang digunakan untuk mempermudah dalam pengolahan data suatu perusahaan
4. *Laporan Keuangan Daerah* adalah Laporan keuangan organisasi sektor publik publik yang merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk

manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Badan pendapatan daerah merupakan salah satu dinas yang bertugas untuk meningkatkan penerimaan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga sedang giat-giatnya berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Badan pendapatan daerah sebagai satuan kerja daerah (SKPD) pemerintah provinsi Sulawesi Selatan yang diberikan kewenangan mengamban tugas di bidang pendapatan, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana pemerintah daerah mempunyai hak mengelola pendapatan daerah, antara lain memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan Sumber Daya Alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang sah guna pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sekitar tahun 1972 dibawah dinas pendapatan daerah merupakan salah satu bagian pada biro keuangan setwilda provinsi Sulawesi selatan dengan nama bagian penghasilan daerah.

Perkembangan selanjutnya dengan luasnya daerah kerja urusan yang menyangkut pendapatan daerah baik meliputi pendapatan asli daerah sendiri (pajak, retribusi, dan pendapatan-pendapatan daerah lainnya yang sah maupun pendapatan Negara yang diserahkan ke daerah provinsi) dan setiap SKPD mendapatkan tugas khusus dari secretariat pemerintah provinsi Sulawesi selatan.

Bagian pendapatan daerah pada biro keuangan menjadi urusan tersendiri dan merupakan dinas otonomi yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Gubernur/pemerintah provinsi Sulawesi selatan Nomor : 130/IV/1973 tanggal 17 april 1973 tentang pembentukan dinas pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan.

Badan pendapatan daerah provinsi dati 1 sulawesi selatan sebagai aparat pemupuk pendapatan daerah provinsi dati 1 sulawesi selatan perlu ditingkat kembangkan pengelolaannya baik pelayanan kepada masyarakat maupun peningkatan pendapatan daerah sehingga untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud ditetapkanlah susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah provinsi Sulawesi selatan nomor 6 tahun 1979 tentang

susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan.

Pada tahun 2016 dinas pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan berganti nama menjadi badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan merujuk pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mengamanahkan peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, yang pada akhirnya ditindak lanjuti dengan peraturan gubernur Sulawesi selatan nomor 99 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan.

2. Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Berlokasi di Jalan A.P. Pettarani No. 1 Makassar. Adapun Struktur organisasi Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi 3 (tiga)

Sub Bagian, yaitu:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 2) Sub Bagian Program;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
- 1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah;
 - 3) Sub Bidang Peraturan Pendapatan Daerah.
- d. Bidang Pendapatan Asli Daerah Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
- 1) Sub Bidang PAD I;
 - 2) Sub Bidang PAD II;
 - 3) Sub Bidang PAD III.
- e. Bidang Teknologi dan Sistem Informasi Lainnya dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
- 1) Sub. Bidang Data dan Informasi;
 - 2) Sub Bidang Infrastruktur Jaringan dan Pengembangan Aplikasi;
 - 3) Sub Bidang Verifikasi dan Vaidasi Objek dan Subjek Pajak;
- f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
- 1) Sub Bidang Pembinaan Teknis Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pengawasan;

3) Sub Bidang Penegakan Hukum dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan:

g. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPTP) dipimpin oleh kepala UPTB dan membawahi 3 (tiga) Sub bagian/Seksi, yaitu:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Seksi Pendataan dan Penetapan;
- 3) Seksi Penagihan dan Penerimaan.

3. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, serta pengendalian dan pembinaan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah meliputi bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah,

retribusi dan pendapatan daerah lainnya, serta pengendalian dan pembinaan;

b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan daerah meliputi bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya,serta pengendalian dan pembinaan;

c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, serta pengendalian dan pembinaan.

4. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data bulan Desember 2021, jumlah Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 486 orang yang terdiri dari PNS laki-laki 304 orang dan PNS perempuan 182 orang.

5. Visi dan Misi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai satuan kerja perangkat daerah ikut berusaha mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan. untuk mencapai hal tersebut di atas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan visi “Maksimalnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pengelolaan

Pendapatan Daerah yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel dan Inovatif.”

Visi tersebut di atas mengandung 2 (dua) substansi utama yaitu terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang maksimal dan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan, akuntabel dan inovatif. Visi tersebut di atas merupakan komitmen dari seluruh elemen yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mewujudkan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Good and Clean Government).

Untuk mewujudkan visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% (tiga belas persen) per tahun dan total Pendapatan Daerah sekitar 10% (sepuluh persen) per tahun;
- b. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak;
- c. Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab dan profesional dalam mengelola pendapatan daerah;
- d. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.
- e. Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian

B. Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322). Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 230). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319). Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan

Nomor 73 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun laporan yang terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas dan
5. Catatan atas Laporan keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya, informasi tersebut berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.

- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Gambar 1

Tabel proses dan prosedur pencatatan Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMA DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020					
NO	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	4.396.205.948.232,00	4.047.512.467.937,39	92,07	3.372.793.834.159,77
2					
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.396.121.199.232,00	4.041.444.717.937,39	92,06	3.367.399.934.159,77
4	Pendapatan Pajak Daerah	4.279.817.812.783,00	4.040.736.206.311,26	94,43	3.342.632.289.609,31
5	Pendapatan Retribusi Daerah	166.345.000,00	271.700.736,00	163,39	275.999.196,00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	113.551.913.511,01	117.432.932.431,00	103,46	113.022.533.670,00
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	181.686.868.038,99	70.876.707.421,13	39,01	89.670.111.714,47
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - BANA PERUMUDANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00
15					
16	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dana Operasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
19					
23	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pendapatan Hibah	4.101.407.843,79	2.897.000.000,00	70,64	1.104.000.000,00
25	Pendapatan Cukai Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Pendapatan Lainnya	1.905.713.000,00	3.996.700.000,00	210,13	0,00
27					
28					
29					
30					
31	BELANJA DAERAH	167.700.876.940,00	157.447.168.076,00	93,88	163.103.136.182,00
32					
33	BELANJA OPERASI	163.831.691.840,00	153.927.347.676,00	93,96	157.830.628.182,00
34	Belanja Pegawai	122.515.848.352,00	115.218.081.271,00	94,04	119.338.041.400,00
35	Belanja Barang dan Jasa	41.418.813.386,00	38.711.494.303,00	93,46	38.600.387.700,00
36	Belanja Bangun	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
40					
41	BELANJA MODAL	3.769.185.000,00	3.519.821.000,00	93,12	7.166.501.000,00
42	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Modal Perawatan dan Pemeliharaan	2.185.215.000,00	2.152.309.000,00	98,48	8.650.599.000,00
44	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.243.944.000,00	1.237.472.000,00	99,46	605.133.000,00
45	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	110.799.000,00
46	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Belanja Modal Aset Lainnya	330.999.000,00	328.989.000,00	99,39	0,00
48		0,00	0,00	0,00	0,00

kewajiban dan ekuitas dana masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa dimasa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah

Gambar 2

Tabel proses dan prosedur pencatatan Neraca

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN				
BADAN PENDAPATAN DAERAH				
NERACA				
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020				
NO	URAIAN	2021		
		1	2	3
0	REK	198.897.788.775,01		178.899.822.177,88
1	REK LANGKA	198.897.788.775,01		178.899.822.177,88
2	Rasa & Rasa Lainnya	0,00		0,00
3	Rasa & Makanan Pengolahan	0,00		0,00
4	Rasa & Makanan Pengolahan	0,00		0,00
5	Rasa & Minum	0,00		0,00
6	Rasa & Minum	0,00		0,00
7	Rasa & Minum	0,00		0,00
8	Rasa & Makanan & Makanan Pengolahan	0,00		0,00
9	Intensitas Rasa Lainnya	0,00		0,00
10	Intensitas Rasa Lainnya	0,00		0,00
11	Plasma Pupa	198.897.788.775,01		178.899.822.177,88
12	Plasma Pupa	0,00		0,00
13	Plasma Pupa Lainnya	0,00		0,00
14	Plasma Pupa Lainnya	0,00		0,00
15	Plasma Pupa Lainnya	0,00		0,00
16	Plasma Pupa Lainnya	0,00		0,00
17	Plasma Pupa Lainnya	0,00		0,00
18	Plasma Pupa Lainnya	0,00		0,00
19	Plasma Pupa Lainnya	0,00		0,00
20	Plasma Pupa Lainnya	0,00		0,00
21	Plasma Pupa Lainnya	0,00		0,00
22	Plasma Pupa Lainnya	0,00		0,00
23	Plasma Pupa Lainnya	0,00		0,00
24	Plasma Pupa Lainnya	0,00		0,00
25	Plasma Pupa Lainnya	0,00		0,00
26	Plasma Pupa Lainnya	0,00		0,00
27	Plasma Pupa Lainnya	0,00		0,00
28	Plasma Pupa Lainnya	0,00		0,00
29	Plasma Pupa Lainnya	0,00		0,00
30	Plasma Pupa Lainnya	0,00		0,00
31	Jumlah atas Neraca	198.897.788.775,01		178.899.822.177,88
32	Rekondisi			
33	Rekondisi			
34	Rekondisi			
35	Rekondisi			
36	Rekondisi			
37	Rekondisi			
38	Rekondisi			
39	Rekondisi			
40	Rekondisi			
41	Rekondisi			
42	Rekondisi			
43	Rekondisi			
44	Rekondisi			
45	Rekondisi			
46	Rekondisi			
47	Rekondisi			
48	Rekondisi			
49	Rekondisi			
50	Rekondisi			
51	Rekondisi			
52	Rekondisi			
53	Rekondisi			
54	Rekondisi			
55	Rekondisi			
56	Rekondisi			
57	Rekondisi			
58	Rekondisi			
59	Rekondisi			
60	Rekondisi			
61	Rekondisi			
62	Rekondisi			
63	Rekondisi			
64	Rekondisi			
65	Rekondisi			
66	Rekondisi			
67	Rekondisi			
68	Rekondisi			
69	Rekondisi			
70	Rekondisi			
71	Rekondisi			
72	Rekondisi			
73	Rekondisi			
74	Rekondisi			
75	Rekondisi			
76	Rekondisi			
77	Rekondisi			
78	Rekondisi			
79	Rekondisi			
80	Rekondisi			
81	Rekondisi			
82	Rekondisi			
83	Rekondisi			
84	Rekondisi			
85	Rekondisi			
86	Rekondisi			
87	Rekondisi			
88	Rekondisi			
89	Rekondisi			
90	Rekondisi			
91	Rekondisi			
92	Rekondisi			
93	Rekondisi			
94	Rekondisi			
95	Rekondisi			
96	Rekondisi			
97	Rekondisi			
98	Rekondisi			
99	Rekondisi			
100	Rekondisi			

NO	URAIAN	2021	2020
1	2	3	4
41	Jasa Titip Lantar	86.976.770,00	86.270.770,00
42	Reklamasi Jalan Persewaan	0,00	0,00
43	Manajemen Perumahan	100.000.000,00	100.000.000,00
44	Jasa-hati Titip	86.245.000.720,00	86.049.911.000,00
45			
46	Jasa-hati Dana Cadangan	0,00	0,00
47	KEPT LAINNYA	0,00	0,00
48	Hutang Persewaan Negara	0,00	0,00
49	Hutang Ganti Rugi	0,00	0,00
50	Surat-masa Asuransi Pihak Ketiga	0,00	0,00
51	Hutang Tax Debetaris	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
52	Hutang Pajak	0,00	0,00
53	Hutang-hutang Persewaan-hati Lantar	1.200.000.000,00	0,00
54	Jasa-hati Asuransi Lainnya	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
55			
56	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
57			
58	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
59			
60	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
61			
62	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
63			
64	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
65			
66	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
67			
68	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
69			
70	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
71			
72	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
73			
74	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
75			
76	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
77			
78	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
79			
80	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
81			
82	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
83			
84	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
85			
86	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
87			
88	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
89			
90	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
91			
92	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
93			
94	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
95			
96	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
97			
98	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
99			
100	Jumlah Asuransi	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00

Sumber: Arsip laporan catatan atas laporan keuangan 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

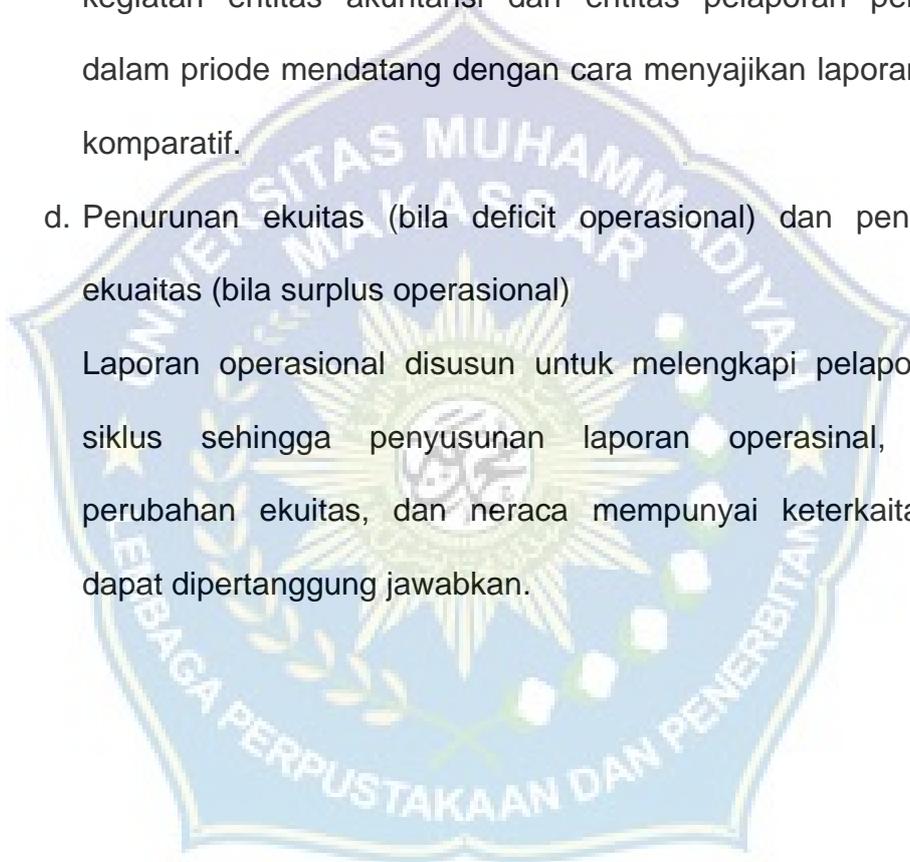
3. Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan priode sebelumnya.

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai :

a. Besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas akuntansi

- b. Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
 - c. Prediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
 - d. Penurunan ekuitas (bila deficit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional)
- Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggung jawabkan.



Gambar 3

Table proses dan prosedur pencatatan Laporan Operasional

 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020					
NO	URAIAN	2021	2020	Penurunan / (Peningkatan)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	4.188.216.034.883,87	3.651.129.023.490,73	537.087.011.393,14	14,71
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.182.128.284.883,87	3.645.935.023.490,73	536.193.261.393,14	14,71
3	Pendapatan Pajak Daerah	3.472.697.412.234,43	3.355.827.199.852,10	516.870.212.382,33	15,40
4	Pendapatan Retribusi Daerah	279.780.736,00	275.999.198,09	3.781.538,00	1,37
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	228.755.635.860,45	218.052.827.002,89	10.702.808.857,56	4,91
6	Lain-lain PAD yang Sah	88.395.436.262,99	71.779.187.437,94	16.616.248.825,05	12,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	4.182.128.284.883,87	3.645.935.023.490,73	536.193.261.393,14	14,71
8					
9	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6.087.750.000,00	5.194.000.000,00	893.750.000,00	17,21
10	Pendapatan Hibah	5.587.750.000,00	5.194.000.000,00	893.750.000,00	17,21
11	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	6.087.750.000,00	5.194.000.000,00	893.750.000,00	17,21
14	JUMLAH PENDAPATAN	4.188.216.034.883,87	3.651.129.023.490,73	537.087.011.393,14	14,71
15					
16	BEBAN	159.867.682.482,36	173.959.833.450,93	(14.092.150.968,59)	(8,10)
17	BEBAN OPERASI	131.591.631.084,38	165.114.689.106,40	(13.521.058.022,02)	(8,19)
18	Beban Pegawai	114.324.910.368,00	127.055.376.247,09	(12.730.463.879,09)	(10,02)
19	Beban Barang dan Jasa	16.266.720.716,38	37.194.934.181,06	(888.433.798,00)	(2,39)
20					
21	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Beban Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Beban Penyusutan Pagarang	965.426.353,38	864.376.098,80	101.047.654,98	11,11
28	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jumlah Beban Operasi	131.591.631.084,38	165.114.689.106,40	(13.521.058.022,02)	(8,19)
30					
31	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	8.276.051.397,98	8.845.144.344,35	(569.092.946,37)	(6,43)
32	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.914.201.221,05	7.531.900.981,15	(617.709.760,10)	(8,20)
33	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.261.829.182,38	1.227.778.474,48	34.050.707,94	2,77
34	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.020.994,55	85.374.889,00	12.646.105,55	15,98
35	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	8.276.051.397,98	8.845.144.344,35	(569.092.946,37)	(6,43)
39					
40	BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
42	JUMLAH BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
43	JUMLAH BEBAN	159.867.682.482,36	173.959.833.450,93	(14.092.150.968,59)	(8,10)

43					
44	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	4.028.348.352.401,51	3.477.169.190.039,78	551.179.162.361,73	13,85
45					
46	SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	4.348.842.551.611,88	0,00	4.348.842.551.611,88	0,00
47	SURPLUS NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Surplus Perjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Surplus Penyediaan Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Jumlah Surplus Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
52					
53	DEFISIT NON OPERASIONAL	758.834.245,45	0,00	758.834.245,45	0,00
54	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Defisit Penghapusan Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Defisit Penyediaan Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	758.834.245,45	0,00	758.834.245,45	0,00
58	Jumlah Defisit Non Operasional	758.834.245,45	0,00	758.834.245,45	0,00
59	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(758.834.245,45)	0,00	(758.834.245,45)	0,00
60					
61	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	4.027.589.518.156,06	3.477.169.190.039,78	550.420.328.116,28	13,83
62	PENDAPATAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
65	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Arsip laporan catatan atas laporan keuangan 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos pos:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus / deficit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya :

1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada priode-priode sebelumnya.

2) Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.

Disamping itu suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat

dalam laporan Perubahan Ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan.

Gambar 4

Table proses dan prosedur pencatatan Laporan Perubahan Ekuitas

 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020			
NO	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020
1	2	3	4
1	EKUITAS AWAL	3.631.399.210.588,02	3.990.585.070.607,84
2	SURPLUS/DEFISIT/KE	4.027.587.518.150,98	3.477.169.190.039,78
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KEWAJABAN MENDASAR	(3.491.727.840.471,53)	(2.836.365.050.059,60)
4	Belanja Konsolidasi (RK)	(3.432.513.829.458,93)	(3.037.253.675.984,68)
5	Koreksi Aset Lancar	(162.292.395,50)	888.493.938,93
6	Koreksi Investasi	0,00	0,00
7	Koreksi Aset Tetap	0,00	0,00
8	Koreksi Aset Lainnya	0,00	0,00
9	Koreksi Penyusutan Aset Tetap	448.489,18	0,15
10	Koreksi Penyusutan aset Lainnya	0,00	0,00
11	Koreksi Hutang	937.832.562,00	131.586,00
12	EKUITAS AKHIR	4.167.290.888.272,53	3.631.399.210.588,02

Sumber: Arsip laporan catatan atas laporan keuangan 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan dan ekonomi makro;

- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian penting lainnya.
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- 6) Informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan dan menyajikan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber

daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4575);

- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 230), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);

- 15) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
- 16) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 Nomor 73);
- 17) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 74);
- 18) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 42);

- 19) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2388/XI/Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021.

C. Kendala pada Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan

Kinerja keuangan daerah akan berjalan dengan baik tentunya dipengaruhi oleh faktor dari dalam maupun dari luar bagian keuangan itu sendiri. Adapun kendala/faktor-faktor penghambat pada sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu a) Kendala jaringan. b) Ketidakstabilan kinerja Bendahara disetiap UPT Kabupaten karena sering terjadi keterlambatan dalam penyetoran SPJ.

D. Keunggulan pada Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan pada BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan

Keunggulan pada sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu semua laporan mulai dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan catatan atas

laporan keuangan sudah dalam satu sistem yang mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah berjalan dengan baik. sebagaimana Prosedur yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan. Prosedur ini mengatur kelancaran kegiatan operasional khususnya untuk Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
2. Kendala/faktor-faktor penghambat pada sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu a) Kendala jaringan. b) Ketidakstabilan kinerja Bendahara disetiap UPT Kabupaten karena sering terjadi keterlambatan dalam penyetoran SPJ.
3. Keunggulan pada sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu semua laporan mulai dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan catatan atas laporan keuangan sudah dalam satu sistem yang mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis sistem dan prosedur dalam penyusunan laporan keuangan badan pendapatan daerah

provinsi Sulawesi selatan, penulis memberikan saran agar badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi selatan memaksimalkan/mempertegas jangka waktu pengumpulan SPJ setiap Bendahara di UPT. Sehingga akan memperlancar/mempermudah proses penyusunan laporan keuangan.

Untuk kendala jaringan agar kiranya Badan pendapatan Daerah Prov. Sulsel meningkatkan kerjasama jaringan dengan pihak provider untuk memaksimalkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel.

Pada sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu semua laporan mulai dari Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan sudah dalam satu sistem yang mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida Nahar dan Siti Aliyah, 2018, "*Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Jepara*
- Baridwan, Zaki. 2019. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*, Edisi Lima. Yogyakarta: BPF E.
- Bastian, Indra. 2016, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Betha Yudha N, S.Stp. 2020. *Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Pengendalian Keuangan Daerah di Dinas Kesehatan Kota Palembang*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- B. Romney, Marshall & Paul Jhon Steinbart. 2020. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Tiga Belas. Jakarta : Salemba Empat.
- Darminto, Dwi Prastowo. 2019. *Analisis Laporan Keuangan. Konsep dan Aplikasi*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Indrawan, R. & Yaniawati R.P. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama
- Jusup, Al. Haryono. 2017. *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1*, Edisi Tujuh Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Mahsun, Muhammad. dkk. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta: BPF E-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mulyadi. 2019. *Sistem Akuntansi*, Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Diperoleh 08 Mei 2018, dari <https://staff.blog.ui.ac.id>
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Diperoleh 20 Februari 2018, dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>

Sinambela, LijanPoltak. 2019. *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. BumiAksara

Sri Rahayu, 2017, “Studi Fenomenologis terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah (Bukti Empiris dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Propinsi Jambi)”, Simposium Nasional Akuntansi X

Sutrisno. 2018. *Proses Penyusunan Laporan Keuangan*, Edisi Ketiga Yogyakarta: EKONISIA.



BIOGRAFI PENULIS



MUH. JALIL. Panggilan Jalil lahir di Sungguminasa pada tanggal 23 Juli 1996 dari pasangan suami istri Bapak Abd. Rahman dan Ibu Mariati. Peneliti adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal Bontocinde Desa Panakkukang Kec. Pallangga Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu MIS Bontocinde lulus tahun 2008, SMPN 4 Pallangga lulus tahun 2011, SMK YPKK Limbung lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2015 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muh. Jalil
NIM : 105730538015
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9%	10 %
2	Bab 2	19%	25 %
3	Bab 3	10%	10 %
4	Bab 4	10%	10 %
5	Bab 5	5%	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 2 Februari 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I MUH. JALIL 105730538015

by Tahap Tutup



Submission date: 03-Feb-2023 03:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 2005424573

File name: 05_BAB_I.docx (43.58K)

Word count: 601

Character count: 4180

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.termpaperwarehouse.com

Internet Source

3%

2

123dok.com

Internet Source

2%

3

terasmaluku.com

Internet Source

2%

4

es.scribd.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

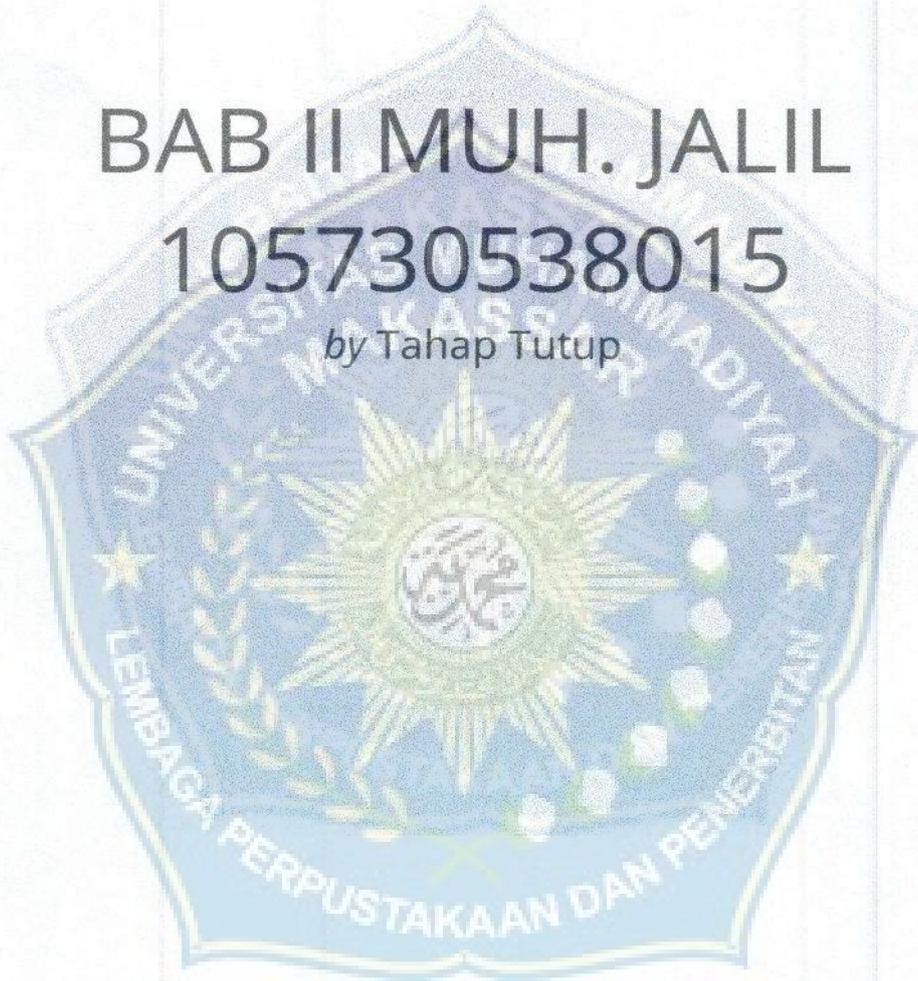
On



BAB II MUH. JALIL

105730538015

by Tahap Tutup



Submission date: 03-Feb-2023 03:39PM (UTC+0700)

Submission ID: 2005424872

File name: 06_BAB_II.docx (62.56K)

Word count: 3131

Character count: 21046

BAB II MUH. JALIL 105730538015

ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 dspace.uii.ac.id
Internet Source

15%

2 eprints.umpo.ac.id
Internet Source

3%



Exclude quotes On
Exclude bibliography On

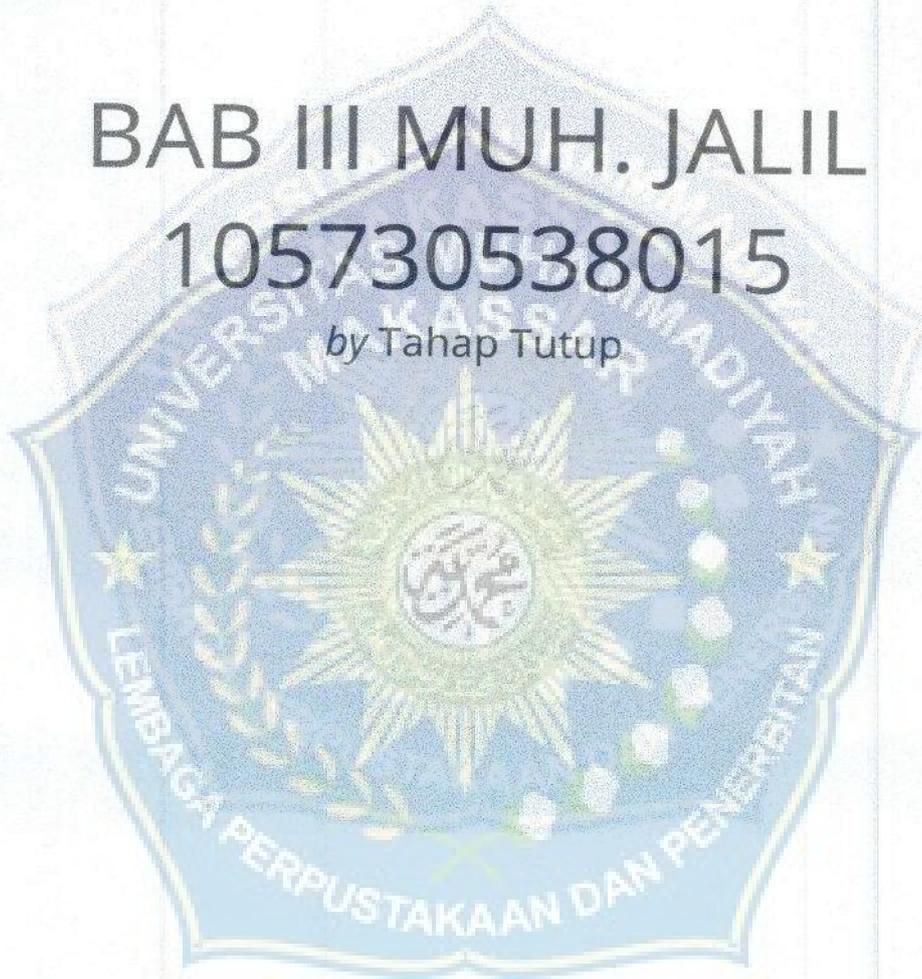
Exclude matches < 2%



BAB III MUH. JALIL

105730538015

by Tahap Tutup



Submission date: 03-Feb-2023 03:42PM (UTC+0700)

Submission ID: 2005425534

File name: 07_BAB_III.docx (42.96K)

Word count: 394

Character count: 2655

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX	10% INTERNET SOURCES	3% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	jom.unpak.ac.id Internet Source	3%
2	repository.usd.ac.id Internet Source	2%
3	www.scribd.com Internet Source	2%
4	ejurnal.itats.ac.id Internet Source	2%

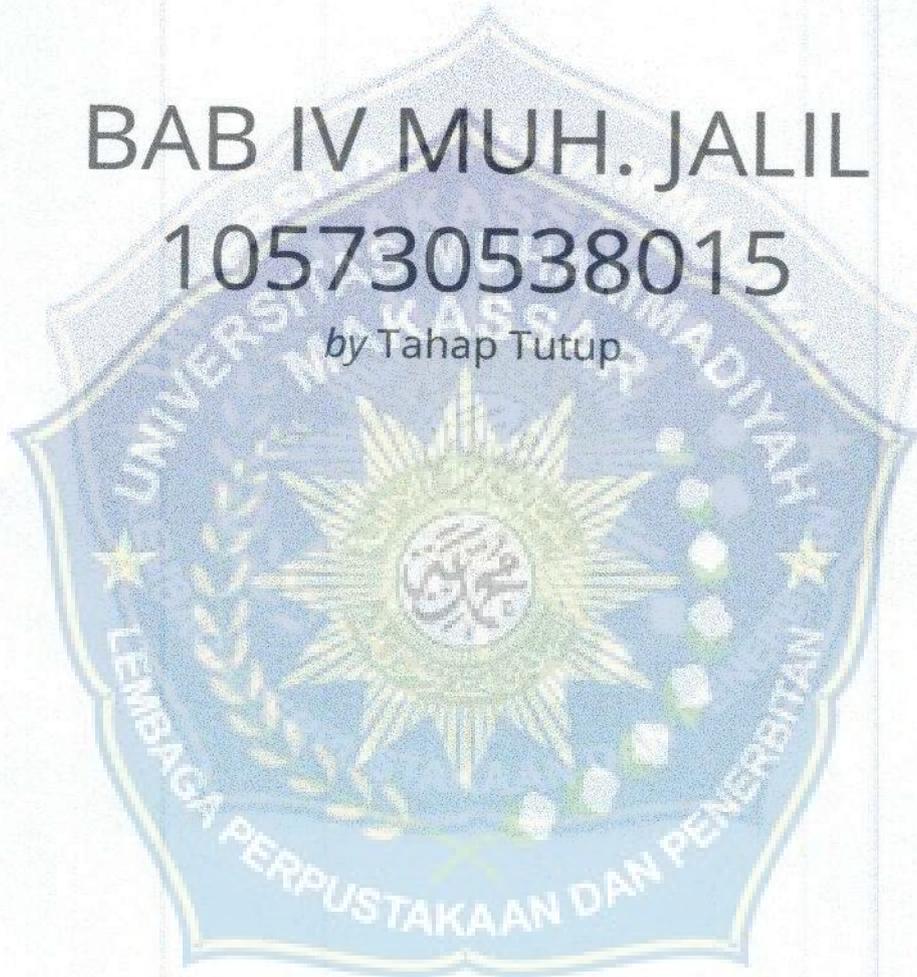


Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On

BAB IV MUH. JALIL

105730538015

by Tahap Tutup



Submission date: 03-Feb-2023 03:41PM (UTC+0700)

Submission ID: 2005425367

File name: 08_BAB_IV.docx (1.79M)

Word count: 2622

Character count: 17612

BAB IV MUH. JALIL 105730538015

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

27%
INTERNET SOURCES

14%
PUBLICATIONS

5%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-renggar.kemkes.go.id Internet Source	2%
2	jdih.ttskab.go.id Internet Source	2%
3	bappeda.jatimprov.go.id Internet Source	2%
4	core.ac.uk Internet Source	2%
5	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB V MUH. JALIL

105730538015

by Tahap Tutup



Submission date: 03-Feb-2023 03:44PM (UTC+0700)

Submission ID: 2005426048

File name: 09_BAB_V.docx (41.72K)

Word count: 170

Character count: 1204

BAB V MUH. JALIL 105730538015

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES



0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.scribd.com

Internet Source

turnitin

5%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

